

Leech's Politeness Maxim in the 2024 West Sumatra Gubernatorial Debate: Compliance, Violation, and Debate Learning Implications

Maksim Kesantunan Leech dalam Debat Pilgub Sumatera Barat 2024: Pematuhan, Pelanggaran, dan Implikasi Pembelajaran Debat

Sasrianti¹ Agustina^{2,*}

Universitas Negeri Padang^{1,2}

*Corresponding author. Email: agustina@fbs.unp.ac.id

doi: 10.24036/jbs.v13i3.137580

Submitted: Dec 1, 2025

Revised: Dec 19, 2025

Accepted: Dec 28, 2025

Abstract

This study analyzes compliance with and violations of the principles of polite language based on Leech's six maxims (tact, generosity, approbation, modesty, agreement, sympathy) in the official debates of the 2024 West Sumatra governor and deputy governor candidates held by the West Sumatra KPU. The research data consisted of 227 expressive speech acts extracted from two debate sessions and transcribed from public broadcasts. The study used a qualitative descriptive approach with content analysis methods through the stages of video collection, transcription, coding based on Leech's maxims, and classification of each data unit into compliance or violation categories. The results show that violations (54.2%) were more dominant than compliance (45.8%). The most prominent violations occurred in the maxim of tact, namely 112 violations from 197 tact data (56.9%), which mainly appeared in the argumentation/rebuttal segment as the most intense part of the debate with competing claims and evaluations. Segmentally, violations were concentrated in the argumentation/rebuttal segment, while the opening segment in the extracted corpus tended to contain compliant utterances. These findings confirm that politeness in political debates is contextual and can serve a strategic function in building image, strengthening position, and attacking opponents' arguments. Pedagogically, debate excerpts can be used as teaching materials for Indonesian language in high schools/MA to (1) practice identifying compliance/violation of maxims, (2) practice reformulating criticism to remain argumentative but more polite, and (3) develop a speaking assessment rubric based on politeness indicators.

Key words: *Leech's politeness principles; politeness maxims; politeness violation; political debate; expressive speech acts; debate pedagogy*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pematuhan dan pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa berdasarkan enam maksim Leech (tact, generosity, approbation, modesty, agreement, sympathy) pada debat resmi calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat 2024 yang diselenggarakan KPU Sumbar. Data penelitian berupa 227 tindak tutur ekspresif yang diekstraksi dari dua sesi debat dan ditranskripsi dari siaran publik. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis isi melalui tahapan pengumpulan video, transkripsi, pengodean berdasarkan maksim Leech, serta klasifikasi setiap unit data ke dalam kategori pematuhan atau pelanggaran. Hasil menunjukkan bahwa pelanggaran (54,2%) lebih dominan dibandingkan pematuhan (45,8%). Pelanggaran paling menonjol terjadi pada maksim kebijaksanaan (*tact*), yakni 112 pelanggaran dari 197 data maksim kebijaksanaan (56,9%), yang terutama muncul pada segmen argumentasi/sanggahan sebagai bagian debat yang paling padat dengan adu klaim dan evaluasi. Secara segmental, pelanggaran terkonsentrasi pada segmen argumentasi/sanggahan, sedangkan segmen pembukaan dalam korpus yang diekstraksi cenderung memuat tuturan patuh. Temuan ini menegaskan bahwa kesantunan dalam debat politik bersifat kontekstual dan dapat berfungsi strategis untuk membangun citra, menguatkan posisi, dan menyerang argumen lawan. Secara pedagogis, cuplikan debat dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar Bahasa Indonesia di SMA/MA untuk (1) melatih identifikasi pematuhan/pelanggaran maksim, (2) latihan reformulasi kritik agar tetap argumentatif namun lebih santun, dan (3) pengembangan rubrik penilaian berbicara berbasis indikator kesantunan.

Kata kunci: *prinsip kesantunan Leech; maksim kesantunan; pelanggaran kesantunan; debat politik; tindak tutur ekspresif; pembelajaran debat*

PENDAHULUAN

Debat politik merupakan arena komunikasi publik yang kompetitif, sehingga pilihan bahasa kandidat tidak semata-mata menyampaikan program, melainkan juga berfungsi strategis untuk membedakan diri dari lawan, membangun persona/legitimasi, serta membingkai realitas sosial-politik bagi audiens (Benoit, 2007; Fairclough, 1989; Chilton, 2004). Dalam situasi seperti ini, prinsip kesantunan berbahasa berpotensi dipatuhi sebagai bentuk *face-work* untuk menjaga muka (*face*) dan meminimalkan tindakan yang mengancam muka (*face-threatening acts*), tetapi juga dapat sengaja dilanggar sebagai sumber daya retorik untuk menegaskan posisi, melancarkan kritik, dan menguatkan daya argumentasi dalam kontestasi kuasa (Goffman, 1967; Brown & Levinson, 1987; Fairclough, 1989).

Fenomena tersebut relevan dikaji pada Debat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2024 karena memperlihatkan negosiasi kesantunan di ruang publik yang disiarkan luas, sekaligus berada dalam konteks sosial-budaya yang menilai kehati-hatian berbahasa sebagai nilai penting. Kajian ini urgen karena memberi bukti empiris mengenai bagaimana kesantunan bekerja secara kontekstual dalam wacana politik lokal, serta menyediakan dasar yang kuat untuk merumuskan materi pembelajaran Bahasa Indonesia, khususnya pembelajaran debat dan keterampilan berbicara agar siswa mampu berargumentasi kritis tanpa mengabaikan etika berbahasa.

Landasan konseptual penelitian ini bertumpu pada prinsip kesantunan Leech yang memandang kesantunan sebagai pedoman pragmatik (*constraint/strategi*) dalam perilaku komunikatif untuk mengelola relasi interpersonal dan menghindari disharmoni dalam interaksi (Leech, 1983; Leech, 2014). Kerangka tersebut dioperasionalkan melalui enam maksim, yaitu kebijaksanaan (*tact*), kedermawanan (*generosity*), pujian/penghargaan (*approbation*), kerendahan hati (*modesty*), kesepakatan (*agreement*), dan simpati (*sympathy*) (Leech, 1983). Dalam analisis, setiap tuturan dipahami sebagai bentuk pematuhan apabila strategi kebahasaan yang digunakan cenderung meminimalkan kerugian/biaya bagi pihak lain dan/atau memaksimalkan manfaat/harmoni relasional sesuai indikator maksim terkait (Leech, 1983). Sebaliknya, pelanggaran dipahami sebagai penggunaan strategi yang secara jelas mengabaikan orientasi tersebut, misalnya melalui serangan evaluatif yang memperbesar ketidakharmonisan (termasuk kritik) atau pilihan bentuk yang oleh partisipan dapat dipersepsi sebagai tidak (im)politis/kurang pantas dalam rentang kerja relasional, sehingga efeknya cenderung menguatkan konfrontasi ketimbang pemeliharaan relasi (Leech, 2014; Locher & Watts, 2005). Dengan demikian, kategori pematuhan–pelanggaran tidak diperlakukan sebagai ukuran moral semata, melainkan sebagai pilihan strategis yang harus dibaca secara kontekstual dan dinegosiasikan dalam praktik wacana (mis. debat politik) sesuai tujuan komunikatif penutur dan penilaian partisipan terhadap “kepantasan” tindak tutur (Leech, 2014; Locher & Watts, 2005).

Objek penelitian ini adalah tuturan para kandidat dalam debat resmi calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU dan disiarkan kepada publik. Data dipilih dari dua sesi debat, kemudian ditranskripsi dan ditetapkan sebanyak 227 tindak tutur ekspresif sebagai unit analisis agar kajian terfokus pada tuturan yang memuat sikap, evaluasi, serta ekspresi penilaian yang relevan bagi analisis kesantunan. Pemilihan data debat resmi dipandang tepat karena menghadirkan interaksi yang autentik, berorientasi pada persuasi, dan berlangsung dalam tekanan kompetisi, sehingga memungkinkan munculnya variasi strategi pematuhan maupun pelanggaran maksim kesantunan secara lebih nyata. Selain itu, konteks lokal Sumatera Barat memberikan pijakan sosio-kultural yang penting untuk melihat bagaimana prinsip kesantunan dinegosiasikan dalam wacana politik daerah, sekaligus menyediakan bahan empiris yang relevan untuk diturunkan menjadi contoh pembelajaran debat dan keterampilan berbicara dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA/MA.

Sejumlah penelitian telah menerapkan prinsip kesantunan Leech untuk membaca praktik berbahasa dalam debat politik yang ditayangkan media, dengan fokus pada identifikasi pematuhan dan pelanggaran maksim melalui pengodean tuturan dan penyajian temuan dalam bentuk tabulasi. Studi Hamdani (2016) tentang debat politik di TV One (beragam episode debat) misalnya, menegaskan bahwa analisis berbasis maksim Leech digunakan untuk menandai tuturan yang dinilai tidak santun dan sekaligus membuka peluang pemanfaatan hasil kajian sebagai alternatif bahan ajar. Penelitian lain pada konteks debat calon wakil presiden 2024 di kanal YouTube Metro TV juga menggunakan teori Leech dan metode deskriptif kualitatif, serta melaporkan bahwa tidak semua maksim muncul dalam data debat, yang menunjukkan adanya seleksi strategi kesantunan sesuai

kebutuhan wacana debat (Sujinah 2024). Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa debat politik merupakan konteks yang produktif untuk mengamati bagaimana maksim kesantunan diaktifkan atau diabaikan sebagai bagian dari strategi retorik.

Di luar konteks debat, penelitian Jawas, Yanti, dan Hizbullah (2025) pada layanan pelanggan daring menunjukkan bahwa enam maksim Leech dipakai untuk mengelola relasi sosial dan menjaga penerimaan mitra tutur, sehingga pola kesantunan sangat dipengaruhi oleh tujuan institusional dan posisi penutur–mitra tutur. Sementara itu, kajian kesantunan berbahasa Minangkabau dalam praktik tindak tutur direktif di komunitas lokal menegaskan pentingnya konteks tuturan, strategi bertutur, dan efek strategi terhadap penilaian santun atau tidak santun dalam masyarakat (Sukma, Agustina, dan Ngusman 2012). Dua jalur kajian ini yakni debat politik dan kesantunan Minangkabau di ranah sosial, memberi landasan untuk menempatkan debat KPU Sumatera Barat sebagai objek yang relevan karena menghadirkan persilangan antara kompetisi wacana politik dan latar sosial-budaya lokal. Dengan demikian, naskah Anda dapat diposisikan sebagai penguatan bukti empiris pada debat politik tingkat daerah (KPU Sumbar 2024) sekaligus sebagai dasar perumusan implikasi pembelajaran debat dan keterampilan berbicara di SMA/MA.

Meskipun kajian kesantunan berbahasa dalam wacana politik di Indonesia telah menunjukkan bahwa pematuhan dan pelanggaran maksim kesantunan dapat dipakai sebagai strategi retorik untuk membangun citra serta memperkuat argumentasi, kajian yang memetakan fenomena tersebut secara sistematis pada debat politik tingkat daerah masih relatif terbatas. Selain itu, banyak studi cenderung berhenti pada deskripsi bentuk tuturan santun/tidak santun tanpa menaunkannya secara operasional dengan kebutuhan pembelajaran Bahasa Indonesia, khususnya pembelajaran debat dan keterampilan berbicara di SMA/MA. Berangkat dari keterbatasan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa pemetaan terukur atas pematuhan dan pelanggaran enam maksim kesantunan Leech pada data autentik debat resmi KPU Sumatera Barat 2024, dengan unit analisis 227 tindak tutur ekspresif dari dua sesi debat, sekaligus menurunkan implikasi pedagogis yang dapat diterapkan dalam pembelajaran debat (identifikasi strategi berbahasa, latihan reformulasi kritis, dan pengembangan indikator penilaian berbicara berbasis kesantunan).

Rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) bagaimana bentuk pematuhan dan pelanggaran maksim kesantunan menurut prinsip kesantunan Leech dalam debat calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat tahun 2024; dan (2) bagaimana implikasi temuan pematuhan dan pelanggaran maksim kesantunan tersebut bagi pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA/MA, khususnya pada materi debat dan keterampilan berbicara.

Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan dan memetakan bentuk pematuhan serta pelanggaran maksim kesantunan berdasarkan prinsip kesantunan Leech pada tuturan kandidat dalam debat calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat 2024, serta (2) merumuskan implikasi temuan tersebut bagi pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA/MA, khususnya pada materi debat dan keterampilan berbicara. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi memperkaya kajian pragmatik politik dengan menghadirkan bukti empiris dari wacana debat politik lokal, termasuk penjelasan bahwa kesantunan berfungsi secara kontekstual dan dapat digunakan secara strategis dalam situasi kompetitif. Secara praktis, hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengembangan bahan ajar dan aktivitas pembelajaran debat (misalnya latihan identifikasi strategi kesantunan dan reformulasi tuturan kritis), sekaligus sebagai rujukan penyusunan indikator penilaian berbicara yang menyeimbangkan ketajaman argumentasi dan etika berbahasa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis isi (*content analysis*) untuk memetakan pematuhan dan pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa dalam wacana debat politik. Kerangka analisis mengacu pada enam maksim kesantunan Leech, yaitu kebijaksanaan (*tact*), kedermawanan (*generosity*), pujian/penghargaan (*approbation*), kerendahan hati (*modesty*), kesepakatan (*agreement*), dan simpati (*sympathy*).

Sumber data penelitian ini adalah tuturan dalam debat calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat tahun 2024 pada forum KPU Sumbar yang disiarkan kepada publik (tanggal debat: 13 dan 19 November 2024). Data penelitian difokuskan pada 227 tindak tutur ekspresif yang diidentifikasi dari dua sesi debat dan ditranskripsi dari siaran publik. Sumber data dapat diakses melalui laman daring YouTube KPU Sumbar sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 1. Rincian Sumber Data

No	Tanggal unggahan	Judul video (YouTube)	Tautan	Durasi
1	16 November 2024	Debat Publik Pertama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Pilkada Tahun 2024	https://www.youtube.com/live/kEKygvnTQW0	2:51:46
2	20 November 2024	Debat Publik Kedua Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Pilkada Tahun 2024	https://www.youtube.com/live/k-A12MbKwU8	2:09:47

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahap: (1) pengunduhan/akses video dari sumber resmi, (2) transkripsi ortografis seluruh tuturan kandidat dan moderator, dan (3) ekstraksi unit data berupa tindak tutur ekspresif sesuai kriteria operasional. Transkripsi dilakukan secara verbatim dengan mencatat penanda yang relevan untuk interpretasi pragmatik (misalnya jeda, penekanan, tawa, dan interupsi) menggunakan konvensi transkripsi yang dinyatakan di lampiran agar proses analisis dapat diaudit. Untuk menjamin keterlacakan, setiap kutipan disertai cap waktu (timestamp) serta identitas sesi debat.

Unit analisis adalah satu tindak tutur ekspresif, yaitu satuan ujaran kandidat yang merepresentasikan sikap, evaluasi, emosi, atau penilaian terhadap isu, program, atau pihak lain dalam konteks debat. Satuan ujaran ditetapkan pada level “klausa/kalimat fungsional” di dalam satu giliran bicara (turn), dengan aturan pemotongan: satu unit data berakhir ketika (a) tujuan ilokusi bergeser (mis. dari pujian ke kritik), (b) topik evaluasi berpindah, atau (c) terjadi interupsi yang mengubah struktur respons. Kriteria inklusi mencakup: adanya penanda evaluatif/afektif (mis. “bagus”, “buruk”, “mohon maaf”, “terima kasih”), penilaian atas tindakan/kapasitas, atau ekspresi sikap (setuju/tidak setuju, simpati, apresiasi, keberatan); sedangkan kriteria eksklusi mencakup: pernyataan informatif murni tanpa muatan evaluatif atau relasional.

Instrumen analisis berupa buku kode (codebook) yang menyajikan definisi kerja, indikator, dan contoh untuk masing-masing maksim Leech. Setiap unit data diberi dua label utama: (1) jenis maksim (tact/generosity/approbation/modesty/agreement/sympathy) dan (2) status kesantunan (pematuhan atau pelanggaran) berdasarkan indikator maksim. Aturan keputusan ditetapkan sebagai berikut: (a) setiap unit data diberi satu label maksim yang paling dominan (dominant maxim) untuk menjaga konsistensi perhitungan frekuensi; (b) bila satu ujaran mengandung lebih dari satu maksim, peneliti menetapkan maksim dominan dengan mempertimbangkan tujuan pragmatik utama dan efek interpersonal yang paling menonjol, sedangkan maksim sekunder dicatat dalam memo analitik (tidak dihitung sebagai frekuensi utama); (c) bila suatu unit tidak dapat dipetakan secara memadai ke enam maksim, unit tersebut dikeluarkan pada tahap ekstraksi (sehingga seluruh unit yang masuk korpus bersifat “codable” pada kerangka Leech). Untuk konsistensi, sistem kode data menggunakan format: D[sesi]-[nomor urut]-[inisial penutur]-[timestamp]. Penanda inisial penutur mengikuti praktik yang telah digunakan, misalnya My (Mahyeldi), Vk (Vasko Ruseimy), Ep (Epyardi Asda), dan Ek (Ekos Albar).

Analisis dilakukan melalui tiga langkah: (1) pengodean tiap unit data berdasarkan enam maksim Leech, (2) klasifikasi unit menjadi pemuatan atau pelanggaran, dan (3) interpretasi temuan dengan mempertimbangkan konteks segmen debat (pembukaan, argumentasi/sanggahan, penutup) dan strategi retorik penutur. Hasil disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi dan persentase per maksim serta per segmen, dilengkapi kutipan representatif yang memuat kode data dan timestamp untuk memudahkan verifikasi.

HASIL

Hasil Utama

Berdasarkan total 227 tindak tutur ekspresif ($n = 227$), penelitian ini menemukan 104 data (45,8%) yang mematuhi prinsip kesantunan dan 123 data (54,2%) yang melanggar prinsip kesantunan dalam kerangka maksim Leech. Dengan demikian, secara agregat pelanggaran lebih dominan daripada pemuatan pada korpus yang dianalisis.

Tabel 2. Frekuensi Pemuatan dan Pelanggaran Maksim

Kategori	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Pemuatan	104	45,8
Pelanggaran	123	54,2
Total	227	100

Temuan agregat ini menjadi dasar untuk pemaparan berikutnya, yakni distribusi pemuatan–pelanggaran menurut (a) enam maksim Leech dan (b) segmen debat. Seluruh angka pada tabel-tabel berikut mengacu pada unit data yang sama ($n = 227$) dan dikaitkan dengan kode data serta timestamp untuk menjaga keterlacakan.

Distribusi Pemuatan dan Pelanggaran per Maksim

Distribusi per maksim menunjukkan bahwa data paling banyak terkategori pada maksim kebijaksanaan (*tact*), yakni 197 dari 227 unit (86,8% dari seluruh korpus). Pada maksim *tact* tersebut, pelanggaran berjumlah 112 data (56,9% dari data kebijaksanaan), sedangkan pemuatan berjumlah 85 data (43,1% dari data *tact*).

Untuk maksim selain kebijaksanaan, jumlah data relatif kecil (misalnya kedermawanan total 5; kesepakatan total 4; simpati total 3), sehingga pola persentase pada maksim-maksim tersebut perlu dibaca sebagai deskripsi distribusi dalam korpus ini, bukan generalisasi yang luas. Meski demikian, tabel distribusi tetap penting karena memperlihatkan sebaran kategori patuh/langgar pada setiap maksim sesuai definisi operasional yang dipakai dalam pengodean.

Tabel 3. Distribusi Pemuatan dan Pelanggaran per Maksim

Maksim Leech	Pemuatan (n)	Pelanggaran (n)	Total (n)	Pelanggaran (%)
Kebijaksanaan (<i>Tact</i>)	85	112	197	56,9
Kedermawanan (<i>Generosity</i>)	3	2	5	40
Pujian/Penghargaan (<i>Approbation</i>)	9	3	12	25
Kerendahan hati (<i>Modesty</i>)	2	4	6	66,2
Kesepakatan (<i>Agreement</i>)	3	1	4	25
Simpati (<i>Sympathy</i>)	2	1	3	33,3
Total	104	123	227	54,2

Distribusi Berdasarkan Segmen Debat

Berdasarkan segmentasi operasional (pembukaan, argumentasi/sanggahan, penutup), data terkonsentrasi pada segmen argumentasi/sanggahan dengan total 221 unit (97,4% dari korpus), sedangkan segmen pembukaan hanya memuat 6 unit (2,6% dari korpus). Pada skema ekstraksi yang digunakan, segmen penutup tidak menghasilkan unit tindak tutur ekspresif (0 data).

Tabel 4. Distribusi Pemuatan dan Pelanggaran Maksim per Segmen Debat

Segmen debat	Pemuatan (n)	Pelanggaran (n)	Total (n)	Pemuatan %	Pelanggaran %
Pembukaan	6	0	6	100,0	0,0
Argumentasi/sanggahan	98	123	221	44,3	55,7
Penutup	0	0	0	—	—
Total	104	123	227	—	—

Pada segmen pembukaan, seluruh data yang teridentifikasi bersifat patuh (100%), dan tidak terdapat pelanggaran. Sebaliknya, pada segmen argumentasi/sanggahan, terdapat 98 pemuatan (44,3% dari segmen) dan 123 pelanggaran (55,7% dari segmen).

Contoh Representatif Per Maksim

Untuk memperlihatkan realisasi kategorisasi pada level data, penelitian ini menyajikan contoh representatif untuk tiap maksim dalam format: satu contoh pematuhan dan satu contoh pelanggaran, disertai indikator kebahasaan yang menjadi dasar penetapan kategori. Setiap contoh ditampilkan dengan kode data dan timestamp agar dapat diverifikasi pada sumber video dan transkrip.

Tabel 5. Contoh Pematuhan dan Pelanggaran Maksim dalam Debat Pilgub Sumbar

Maksim	Contoh patuh (kode-waktu)	Indikator patuh (eksplisit)	Contoh langgar (kode-waktu)	Indikator langgar (eksplisit)
Kebijaksanaan	D19 My (47:55–50:02): [Dan Alhamdulillah seperti kami sampaikan, seluruh kegiatan di Sumatera Barat sudah bisa diakses masyarakat di mana saja, bahkan di luar negeri.] (parafrasa: menjelaskan transparansi/akses publik terhadap informasi/kinerja pemerintah).	Tuturan berorientasi <i>benefit to other</i> (publik), leksikon “terbuka/diakses/diawasi”, strategi informatif-positif tanpa menyerang pihak lain.	D31 Ep (1:07:32–1:08:13): [Terima kasih, jawaban Pak Mayeldi ini memang penuh dengan kamufase, mungkin beliau enggak bisa baca.] (parafrasa: menuduh jawaban lawan “kamufase” dan menyerang kapasitas literasi).	Serangan personal (ad hominem), evaluasi negatif langsung, peningkatan <i>cost to other</i> (mengancam muka/face) melalui penghinaan/sarkasme.
Kedermawanan	D22 Vk (56:26–56:50): [Yang terhormat Pak Epi, Bang Ekos, ... kami masih belum sempurna] (parafrasa: mengakui belum sempurna, merendahkan klaim diri).	Strategi self-minimization, pengakuan keterbatasan, penggunaan sapaan hormat yang mengurangi dominasi diri.	D37 Vk (1:18:00–1:18:15): [Dan juga perlu ditambahkan bahwa narkoba juga nomor 6 di Indonesia. Ini data yang terakhir yang kami terima dari BNN Sumatera Barat, di mana keluhannya sampai hari ini, support dari pemerintah provinsi tidak maksimal, hanya cuman kendaraan saja.] (parafrasa: menilai dukungan pihak lain “tidak maksimal” dan	Kritik evaluatif yang menonjolkan kelemahan pihak lain tanpa mitigasi/kompromi, orientasi pada penegasan posisi sendiri (bukan pengorbanan diri).

			mengecilkan kontribusi).	
Pujian	D25 My (1:01:26–1:02:27): [Apa yang dilakukan oleh Pak Epi tadi yang disampaikan, saya kira memang itu bagus.] (parafrasa: menyatakan gagasan lawan “bagus”).	Ekspresi apresiasi eksplisit terhadap mitra tutur, leksikon evaluatif positif (“bagus”), fungsi menjaga relasi dan sportivitas	D167 My (1:05:29–1:05:41): [Alhamdulillah untuk sampai tahun 2024 ini, tadi peningkatan investasi 11,7 triliun, jauh berbeda dengan Kabupaten Solok yang Pak pernah menjadi Bupati, yaitu dari 124 miliar turun menjadi 1 miliar tahun 2021 yang lalu.] (parafrasa: membandingkan capaian sendiri dengan capaian lawan untuk menurunkan nilai lawan).	Strategi perbandingan yang mengandung <i>other-derogation</i> (merendahkan), penonjolan prestasi diri melalui implikatur “lawan lebih rendah”.
Kerendahan hati	D58 Ep (1:38:16–1:39:06): [Saya bangun Cinangkiak, saya rugi, tapi saya ikhlas. Yang penting ada pembangunan, ada yang kerja, itu cita cita saya] (parafrasa: menonjolkan pengorbanan/k erugian pribadi namun menyatakan ikhlas demi publik).	Self-critique/penekanan pada “rugi/ikhlas”, orientasi pada nilai kolektif, pengurangan self-praise.	D73–D74 Ek (1:54:16–1:54:46): [Kepemimpinan di Sumatera Barat, Pak Mayeldi dan Pak Epi, sama-sama orang baik, sama-sama orang baik. Tapi, memimpin Sumatera Barat ini tidak cukup hanya baik saja. Harus ada ketegasan dan sedikit kekerasan...] (parafrasa: memuji lawan di awal lalu menegaskan dengan klaim bahwa “tidak	Kontras pujian–negasi (“tapi/namun”), implikatur superioritas, framing yang menempatkan penutur sebagai standar/solusi.

			cukup” dan menonjolkan kualitas yang diimplikasikan ada pada diri penutur).	
Kesepakatan	D24 Vk (±56:51–57:12): [Ya. Jadi, pada prinsipnya, mungkin Pak Epi dan Pak Ekos mesti banyak baca lagi tentang SPBE. Apa maksudnya dari SPBE itu, biar masyarakat tidak terjadi disinformasi selama ini. Terima kasih.] (parafrasa: menyatakan kritik dengan mitigator seperti “pada prinsipnya” dan “mungkin”).	Mitigasi ketidaksepakatan (hedging: “mungkin”), strategi mengurangi konflik, tetap membuka ruang titik temu.	D21 Ep (55:13–55:56): [Jawabannya cukup bagus, tetapi jauh dari kenyataan yang kami rasakan di rakyat Sumatera Barat. Banyak daerah masih <i>blind spot</i> .] (parafrasa: memberi konsesi singkat lalu menolak keras dengan “tetapi... jauh dari kenyataan”, menyebut “ <i>blind spot</i> ”).	Penanda pertentangan eksplisit (“tetapi”), penolakan langsung, evaluasi negatif yang memperlebar jarak posisi.
Simpati	D32 Vk (1:09:30–1:09:48): [Semoga dengan adanya akselerasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah itu dapat tercapai melalui program unggulan kami pencegahan stunting yang terjadi di Sumatera Barat. Terima kasih.] (parafrasa: menyatakan harapan/dukungan terhadap penanganan masalah sosial seperti stunting,	Ekspresi kepedulian dan harapan bagi publik, leksikon empatik (“semoga”, isu kesejahteraan), penutup sopan.	D38 Vk (1:18:43–1:19:12): [Ya terima kasih Pak Epi, Bang Ekos. Lain kali kalau baca data yang pasti gitu loh, jangan main sebagai calon pemimpin.] (parafrasa: menegur/menyindir lawan agar “lain kali” membaca data, disertai perintah/pelemahan kapasitas).	Direct admonition/imperatif terselubung, nada merendahkan, minim empati terhadap muka lawan (meningkatkan antipati).

menutup dengan
terima kasih).

Secara umum, contoh patuh cenderung memanfaatkan mitigasi, penghormatan, dan evaluasi positif, sedangkan contoh langgar menampilkan evaluasi negatif langsung, serangan personal, serta penolakan tegas yang meningkatkan konfrontasi, terutama pada segmen argumentasi/sanggahan. Contoh-contoh yang sudah dipaparkan pada naskah mencakup, antara lain: maksim kebijaksanaan (patuh D19 My; langgar D31 Ep), kedermawanan (patuh D22 Vk; langgar D37 Vk), penghargaan (patuh D25 My; langgar D167 My), kerendahan hati (patuh D58 Ep; langgar D73–D74 Ek), persetujuan (patuh D24 Vk; langgar D21 Ep), dan simpati (patuh D32 Vk; langgar D38 Vk).

PEMBAHASAN

Temuan keseluruhan menunjukkan bahwa pelanggaran prinsip kesantunan lebih dominan (123 data; 54,2%) dibanding pematuhan (104 data; 45,8%) pada keseluruhan unit analisis ($n=227$). Dominasi pelanggaran tersebut mengindikasikan bahwa, dalam korpus debat Pilgub Sumatera Barat 2024, strategi bertutur yang berpotensi menguatkan konfrontasi lebih sering dipilih daripada strategi pemeliharaan harmoni interpersonal.

Pada tingkat maksim, pola yang paling menonjol adalah pelanggaran terhadap maksim kebijaksanaan (*tact*), yakni 112 pelanggaran dari total 197 data maksim kebijaksanaan (56,9%). Pada tingkat struktur wacana, pelanggaran terpusat pada segmen argumentasi/sanggahan (123 pelanggaran dari 221 data segmen), sementara segmen pembukaan sepenuhnya memuat pematuhan (6 data) dalam skema ekstraksi yang digunakan.

Dominasi pelanggaran maksim kebijaksanaan (*tact*) dapat dibaca sebagai konsekuensi pragmatik dari debat politik yang berorientasi persuasi dan diferensiasi, sehingga kritik langsung, evaluasi negatif, dan strategi penegasan diri menjadi sumber daya retorik yang dianggap efektif. Pola ini konsisten dengan temuan bahwa maksim kebijaksanaan muncul paling salient pada segmen argumentatif, yakni ketika penutur berupaya menekan posisi lawan dan menguatkan klaim diri di hadapan audiens.

Secara linguistik-pragmatik, pelanggaran maksim kebijaksanaan dalam naskah ini tampak melalui ujaran yang memperbesar “biaya” bagi pihak lain (mis. penilaian merendahkan atau serangan personal), sebagaimana dicontohkan pada data yang menilai jawaban lawan sebagai “kamufase” dan menyindir kapasitas literasi (D31). Sebaliknya, pematuhan maksim kebijaksanaan ditunjukkan oleh ujaran yang memaksimalkan manfaat bagi publik (mis. transparansi/akses pengawasan kebijakan) tanpa menyerang pihak lain, seperti pada contoh penyampaian dasbor pemerintahan yang dapat diakses masyarakat (D10).

Distribusi berdasarkan segmen memperlihatkan perbedaan fungsi pragmatik: pembukaan cenderung menjadi ruang “pembangunan citra” dan pengelolaan relasi, sedangkan argumentasi/sanggahan menjadi ruang kompetisi yang memfasilitasi peningkatan intensitas kritik. Secara empiris, pembukaan pada naskah ini memuat pematuhan (6 data) dan tidak memuat pelanggaran, sementara argumentasi/sanggahan memuat 98 pematuhan dan 123 pelanggaran (total 221 data).

Implikasinya, kesantunan beroperasi secara kontekstual dan selektif: strategi patuh lebih mudah muncul pada bagian non-konfrontatif, sedangkan strategi langgar lebih sering tampil ketika tujuan interaksional bergeser ke “penyanggahan” dan delegitimasi argumen lawan. Catatan penting untuk koherensi artikel: tabel segmen menunjukkan penutup=0 data, sehingga klaim “pematuhan muncul pada pembuka dan penutup” perlu disesuaikan atau kriteria ekstraksi segmen penutup perlu ditinjau ulang agar narasi dan tabulasi konsisten.

Hasil ini memperkuat posisi teoretis bahwa pematuhan–pelanggaran tidak dapat direduksi menjadi ukuran moral, melainkan pilihan strategis yang dinegosiasikan dalam praktik wacana, sebagaimana ditegaskan dalam kerangka Leech (termasuk pembacaan kontekstual atas (im)politeness) dan pendekatan relasional. Dengan memusatkan unit analisis pada tindak tutur ekspresif, naskah juga menunjukkan bahwa ekspresi sikap/evaluasi merupakan locus penting bagi kerja kesantunan, karena pada titik inilah konfrontasi dan mitigasi relasional paling jelas termanifestasi.

Dari sisi keterbandingan, temuan bahwa pelanggaran dapat dipetakan melalui pengodean maksim dan berpotensi diturunkan menjadi bahan ajar sejalan dengan kecenderungan studi debat politik berbasis maksim Leech yang menandai tuturan santun/tidak santun dan mengaitkannya

dengan pemanfaatan pedagogis. Temuan ini juga dapat diposisikan berdampingan dengan laporan penelitian yang menunjukkan seleksi strategi kesantunan sesuai kebutuhan wacana debat (mis. tidak semua maksim selalu muncul), sehingga kontribusi naskah akan lebih kuat bila distribusi enam maksim disajikan konsisten dan dapat diverifikasi lintas-segmen.

Implikasi pembelajaran yang relevan adalah pemanfaatan cuplikan debat sebagai bahan ajar untuk melatih kemampuan mengenali pematuhan/pelanggaran maksim, serta mengembangkan keterampilan menyusun kritik yang tetap argumentatif namun lebih santun. Secara operasional, aktivitas kelas dapat difokuskan pada (i) identifikasi indikator kebahasaan yang memicu pelanggaran (mis. evaluasi negatif langsung, serangan personal, penolakan tanpa mitigasi) dan (ii) latihan reformulasi tuturan menjadi bentuk yang lebih mitigatif tanpa menghilangkan substansi argumen.

Pada aspek asesmen, naskah dapat menurunkan rubrik penilaian berbicara/debat yang mengintegrasikan dua dimensi: kualitas argumentasi (ketepatan klaim–data–alasan) dan indikator kesantunan (strategi mitigasi, penghormatan, kesediaan menemukan titik temu, serta pengelolaan simpati). Dengan desain ini, pembelajaran tidak berhenti pada “menghakimi santun/tidak santun”, tetapi menjadikan data autentik debat sebagai laboratorium pragmatik untuk membangun kompetensi berbahasa publik yang kritis, efektif, dan beretika.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa analisis isi deskriptif-kualitatif terhadap 227 tindak tutur ekspresif dalam dua sesi debat resmi Pilgub Sumatera Barat 2024 berhasil memetakan pematuhan dan pelanggaran prinsip kesantunan berdasarkan enam maksim Leech. Dengan unit analisis yang berfokus pada ujaran evaluatif/afektif kandidat, studi ini menyediakan gambaran empiris tentang bagaimana kesantunan dioperasionalkan dalam wacana debat politik yang kompetitif.

Secara keseluruhan, pelanggaran maksim lebih dominan (54,2%) daripada pematuhan maksim (45,8%). Pelanggaran paling menonjol terjadi pada maksim kebijaksanaan (*tact*), yakni 112 pelanggaran dari 197 data kebijaksanaan (56,9%), dan terkonsentrasi pada segmen argumentasi/sanggahan, sedangkan segmen pembukaan cenderung memuat pematuhan dalam korpus yang diekstraksi. Pola ini menegaskan bahwa ketaksantunan dalam debat bersifat kontekstual dan dapat berfungsi sebagai strategi retorik untuk menegaskan posisi, mengkritik, dan mengelola citra di hadapan publik.

Secara teoretis, temuan memperkuat pembacaan bahwa kategori “pematuhan–pelanggaran” perlu dipahami sebagai pilihan pragmatik yang dinegosiasikan dalam situasi persaingan wacana, bukan semata penilaian normatif. Secara pedagogis, cuplikan debat dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar di SMA/MA untuk melatih identifikasi maksim, reformulasi kritik agar tetap argumentatif namun lebih santun, serta penyusunan rubrik penilaian berbicara berbasis indikator kesantunan.

REFERENSI

- Benoit, William L. 2007. *Communication in Political Campaigns: Functional Analysis of Election Messages*. New York: Peter Lang Publishing.
- Brown, Penelope, and Stephen C. Levinson. 1987. *Politeness: Some Universals in Language Usage*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Chilton, Paul. 2004. *Analysing Political Discourse: Theory and Practice*. London, England: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203561218>
- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Culpeper, Jonathan. 1996. “Towards an Anatomy of Impoliteness.” *Journal of Pragmatics* 25 (3): 349–367.
- Elvira, Suci. 2018. “Pelanggaran Prinsip Kesantunan Berbahasa.” *Jurnal Linguistik Indonesia* 36 (2): 150–165.

- Fairclough, Norman. 1989. *Language and Power*. London, England: Longman.
- Goffman, Erving, ed. 1967. *Interaction Ritual: Essays in Face-to-Face Behavior*. Ulvade: Aldine Press.
- Hamdani. 2016. Kesantunan Berbahasa pada Debat Politik di TV One dan Implikasinya sebagai Bahan Ajar di SMA. *Master's thesis*, Universitas Lampung.
- Jawas, Effa Chalisah, Dewi Yanti, and Nur Hizbullah. 2025. "A Pragmatic Analysis of Politeness Maxims in Indonesian Online Customer Service Interactions." *JOLLT Journal of Languages and Language Teaching* 13 (4): 2173–2183. <https://doi.org/10.33394/jollt.v13i4.15258>.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. *Silabus Bahasa Indonesia SMA/MA Kurikulum 2013 (Revisi 2017)*. Jakarta: Kemendikbud.
- Leech, Geoffrey N. 1983. *Principles of Pragmatics*. London: Longman.
- Leech, Geoffrey N. 2014. *The Pragmatics of Politeness*. Oxford: Oxford University Press.
- Locher, Miriam A., and Richard J. Watts. 2005. "Politeness Theory and Relational Work." *Journal of Politeness Research* 1 (1). <https://doi.org/10.1515/jplr.2005.1.1.9>.
- Lubis, Arliya. 2019. "Analisis Pelanggaran Prinsip Kesantunan pada Tuturan Politisi." *Jurnal Pragmatik* 12 (1): 45–60.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyono, Kisyani Laksono, Rusdhianti Wuryaningrum, and Anggoro Abiyyu Ristio Cahyo. 2025. "The Application of Politeness Principles in Speech Acts in the 2024 Presidential Election Debate." *Cogent Arts & Humanities* 12 (1). doi:10.1080/23311983.2025.2495479
- Rahmayanti, Suci, Patriantoro, dan Henny Sanulita. 2018. "Pelanggaran Prinsip Kesantunan Berbahasa." *Jurnal Pendidikan Bahasa* 5 (2): 78–92.
- Sukma, Fiky Reustia, Agustina, dan Ngusman. 2012. "Kesantunan Berbahasa Minangkabau dalam Tindak Tutur Menyuruh di Kenagarian Tambang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan." *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 1 (1), Seri G: 515–599
- Watts, Richard J. 2003. *Politeness*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Zainab, Sujinah, dan Ngatmain. 2024. "Kesantunan Berbahasa dalam Debat Calon Wakil Presiden 2024 di Akun YouTube Metro TV." *Prosiding FKIP* 1 (1). <https://doi.org/10.30651/pc.v1i1.24093>